

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan Koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Koperasi dan UMKM yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia, peran UMKM dan Koperasi yang besar ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja (DSE:2010). Namun dibalik semua itu ternyata Koperasi dan UMKM memiliki permasalahan yang harus dihadapi, yaitu masih rendahnya produktivitas UMKM, rendahnya kualitas SDM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM (DSE:2010).

Selain rendahnya produktivitas, UMKM dan Koperasi juga dihadapkan pada terbatasnya akses kepada sumber daya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Jika ditelusuri lebih jauh lagi masalah keterbatasan akses kredit UMKM dan Koperasi lebih diakibatkan karena tidak adanya informasi yang dapat digunakan oleh manajemen, calon investor ataupun kreditor dalam menilai dan memantau perkembangan UMKM dan Koperasi tersebut. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Rittenberd (1982) dalam Wahidin (2006) yang disimpulkan bahwa pihak bank tidak melihat adanya

perbedaan antara usaha besar dengan UMKM, semuanya diwajibkan untuk memenuhi persyaratan termasuk harus menyediakan laporan keuangan untuk dapat dijadikan dasar dalam memberikan pinjaman kepada calon debitor. Oleh karena itu disinilah pentingnya peran akuntansi dalam UMKM dan Koperasi, karena dengan diselenggarakannya praktik akuntansi secara tepat maka UMKM dan Koperasi dapat menyediakan informasi yang lebih lengkap dan terstruktur terkait usaha dan posisi keuangannya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, yang ada pada Laporan Tahunan 2011 milik Kementerian Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia (2011), diketahui bahwa jumlah koperasi di Jawa Timur per Desember 2012 telah mencapai 29.267 unit. Nilai kontribusi koperasi dan UMKM mencapai 57% dari Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur. Melihat kenyataan tersebut, maka tidaklah mengherankan apabila selama ini koperasi dan UMKM disebut sebagai jenis pelaku ekonomi yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian bangsa (BPS : 2011). Sesuai dengan undang-undang 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, merupakan “badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dari kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip akuntansi”

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai badan penyusun standar akuntansi di Indonesia pada 17 Juli 2009 telah meluncurkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Jenis entitas bisnis yang didasarkan dapat menggunakan SAK ETAP ini adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan seperti UMKM dan koperasi. Otorisasi penggunaan SAK ETAP bagi koperasi telah tertuang pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor: 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi. SAK ETAP tersebut mulai berlaku efektif per 1 Januari 2011

Perbedaan antara PSAK ETAP dan PSAK yang berlaku umum (terkonvergensi IFRS) adalah peraturan PSAK ETAP yang lebih ringkas dan sederhana dibanding PSAK yang berlaku umum, kemudian pertanggungjawaban pengelolaan terhadap stakeholder menggunakan basis stewardship yang mana lebih cenderung menggunakan prinsip reliability sedangkan dalam PSAK umum telah bergeser untuk pemenuhan user dalam pengambilan keputusan sehingga cenderung menggunakan prinsip relevan. kemudian SAK ETAP hanya menggunakan model cost untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti investasi. Sedangkan PSAK umum boleh memilih cost model atau model revaluasi (Martini:2011). Dalam beberapa hal SAK-ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. SAK ETAP sendiri merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum. SAK ETAP relatif tidak berubah selama beberapa tahun serta memiliki bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Sebagai sebuah lembaga ekonomi, yang mana nantinya akan menghasilkan sebuah laporan keuangan, koperasi sudah dipastikan akan berhubungan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja mereka (Khafid : 2010). Selain pihak internal dari koperasi sendiri (pengurus dan anggota), pihak pengguna laporan keuangan lainnya yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja koperasi adalah lembaga keuangan formal seperti perbankan, otoritas pajak, dan pemerintah (terutama ketika memberikan bantuan dana)

Koperasi Serba Usaha yang disingkat KSU "Kencana Makmur" berdiri sejak tahun 1991 yang didirikan oleh para Pemuda Desa Sugihan sebanyak 20 orang pemuda dari berbagai kalangan dan disiplin ilmu dengan prakarsa Sdr Drs. H. Kasdari dengan badan hukum ikut KUD "Tani Bahari" Paciran yang pada waktu itu memang masih ikut kecamatan Paciran, sebelum pisah yang sekarang menjadi kecamatan Solokuro yang pada waktu itu sebagai unit otonomi. Pada koperasi KSU Kencana Makmur merupakan koperasi yang bergerak dibidang usaha yang mana usaha yang dinaunginya berbagai macam usaha seperti Sarana Produksi Pertanian (SAPRODI), Mini Market, Agrobis, Unit Peternakan, Jasa Pengurusan STNK, Jasa Pembayaran Rekening Listrik, Telkom, Pulsa. Unit Produksi Air Kesehatan Hexagonal (MTX), Lapangan Futsal. Sehingga Perusahaan ini memiliki beberapa jenis aset untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Berupa tanah, bangunan (kantor), kendaraan (dua mobil dan lima motor) dan inventaris kantor lain (meja, kursi, komputer, printer, lemari, dll). Hal yang menarik disini adalah bahwa KSU ini sudah berdiri sangat lama, yang mana tentu saja pada pencatatan laporan

keuangannya yang dulu masih menggunakan PSAK yang berlaku umum, yang kemudian pada tahun 2009 muncul kebijakan baru dari DSAK IAI yang menerbitkan Standar Keuangan khusus untuk entitas yang belum *go public* yaitu SAK ETAP. Sehingga perlu adanya penyesuaian dari pihak KSU untuk membuat laporan keuangan yang sesuai standar SAK ETAP. Karena juga banyaknya unit-unit usaha yang dijalankan oleh perusahaan ini membuat penulis sangat tertarik melakukan analisis bagaimana cara perusahaan menyajikan laporan keuangannya, apakah sudah sesuai dengan standar SAK ETAP atau masih belum.

Penelitian penerapan SAK ETAP pada entitas bisnis skala kecil dan menengah, termasuk koperasi, di Indonesia sampai saat ini masih sangat terbatas dan umumnya penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang hanya melihat pada satu entitas koperasi saja (Narsa & Isnalita:2011). Mengacu pada penjelasan singkat di atas maka isu penerapan SAK ETAP pada koperasi merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Dalam hasil penelitian terdahulu mengenai perkembangan penerapan aset tetap yang sesuai SAK ETAP oleh UMKM yang ada di Indonesia yaitu oleh Rudiantoro (2011) bahwa dalam penelitiannya mengatakan bahwa dari total 50 responden UMKM yang ada di Jabodetabek hanya 32% (16 responden) yang mengaku hanya pernah mengetahui atau mendengar adanya peraturan tentang SAK ETAP. Dan hanya sedikit UMKM yang telah menerapkan pengakuan, pengukuran dan penyajian Aset tetap yang sesuai dengan standar SAK ETAP. Hal ini dikarenakan kurangnya juga perhatian pemerintah terhadap perkembangan Standar Akuntansi yang berbasis ETAP ini.

Untuk itu hasil analisa dan evaluasi yang peneliti lakukan, dituangkan kedalam skripsi yang berjudul :

**“ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK ETAP
DI KOPERASI KSU KENCANA MAKMUR LAMONGAN”**

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dalam pengelolaan Laporan Keuangan pada Koperasi KSU Kencana Makmur penulis merumuskan permasalahan “Bagaimana Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Atas Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada Koperasi KSU Kencana Makmur?”

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh koperasi KSU Kencana Makmur yang berdasar pada SAK ETAP sebagai dasar hukum pelaporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi berbagai pihak dan secara global akan memberikan kontribusi kepada:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan bentuk aplikasi keilmuan peneliti yang diperoleh selama perkuliahan. Hal ini diharapkan dapat memperluas

wawasan, pengetahuan, dan pengalaman peneliti untuk berfikir kritis dalam menghadapi berbagai permasalahan.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini sebagai tambahan kepustakaan di bidang Akuntansi dan dapat menjadi bahan perbandingan para akademisi dalam mengembangkan ilmu akuntansi serta sebagai masukan teori bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat sebagai sumber informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dengan topik yang berkaitan dengan penelitian ini. Baik yang bersifat melanjutkan atau menyempurnakan.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini secara khusus akan lebih terfokus pada perlakuan, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan yang ada di KSU Kencana Makmur Lamongan.